



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai penghargaan atas kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat kehadiran yang disesuaikan dengan ketentuan jam kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Tambahan penghasilan adalah pendapatan PNSD selain gaji, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja dan, eselon, pangkat, golongan dan pendidikan, kelangkaan profesi, keahlian khusus serta pertimbangan kapasitas.
6. Waktu kerja efektif adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai layak untuk diberikan tambahan penghasilan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikan Tambahan penghasilan kepada PNSD dalam rangka memacu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan Kepada PNSD.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 4

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. PNSD berdasarkan Jabatan Struktural, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- b. PNSD berdasarkan Jabatan Fungsional yang meliputi :
 1. Jabatan Fungsional Tertentu;
 2. Jabatan Fungsional Umum lainnya/Pelaksana.

Pasal 5

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri:

- a. PNSD berdasarkan Jabatan Struktural, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas;
- b. PNSD berdasarkan Jabatan Fungsional yang meliputi :

1. Tenaga Auditor Fungsional;
2. Dokter Spesialis;
3. Dokter Umum/Gigi RSUD;
4. Dokter Umum/Gigi Puskesmas;
5. Dokter Hewan;
6. Bidan/Perawat RSUD;
7. Analis/Apoteker/As.Apoteker/Nutrisionist/Sanitarian/Rekam Medis/
Radiografer/Elektromedik/Fisioterafis/Administrasi Kesehatan/ Penyuluh
Kesehatan Masyarakat pada RSUD;
8. Bidan/Perawat Puskesmas;
9. Analis/Apoteker/As.Apoteker/Nutrisionist/Sanitarian/Rekam Medis/
Radiografer/ Elektromedik/Fisioterafis/Administrasi Kesehatan/ Penyuluh
Kesehatan Masyarakat /Efidemiology/Entomolgy pada Puskesmas/Dinas
Kesehatan;
10. Polisi Kehutanan;
11. Pemadam Kebakaran;
12. Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Pengawas Dan Pengendalian (Wasdal) LLASDP/LLAJ;
14. Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah;
15. Jabatan Fungsional Lainnya.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;
- b. Pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun;
- c. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar pemerintah kabupaten/Kota;
- d. Pegawai yang berstatus terpidana;
- e. Pegawai yang diberhentikan sementara;
- f. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, Cuti Besar, Cuti Sakit berturut-turut setelah 6 (enam) bulan;
- g. Pegawai pindahan dari Kabupaten/Kota lain tidak diberikan TPP selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan penempatan ditetapkan;
- h. Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah serta pegawai yang belum menyelesaikan TLHP Inspektorat atas nama pribadi;
- i. Pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- j. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 7

Pegawai yang melaksanakan Cuti Tahunan/Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting diberikan TPP.

BAB III

BESARAN

Pasal 8

- (1) Rincian besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.)
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan besaran maksimal tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada PNSD setiap bulannya setelah memenuhi ketentuan perhitungan besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kedisiplinan melalui tingkat kehadiran PNSD.

BAB IV

DASAR, INDIKATOR DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Indikator Penilaian TPP

Pasal 9

- (1) Indikator Penilaian TPP dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran Pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam masa penilaian (satu bulan).
- (2) Indikator atas tingkat kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sub indikator sebagai berikut :
 - a. Hadir sesuai jumlah hari kerja;
 - b. Datang Tepat Waktu;
 - c. Pulang Tepat Waktu (sesuai ketentuan jam kerja).

Bagian Kedua

Pengurangan TPP

Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai yang :
 - a. Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTP);
 - b. Terlambat Masuk Bekerja (TMB);
 - c. Pulang Cepat (PC);
 - d. Meninggalkan Jam Kerja Kantor Tanpa Keterangan (MJKKTK).

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (perseratus).
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengurangan TPP karena Tidak Hadir Tanpa Keterangan sebesar 100% dari TPP *Netto* per hari;
 - b. Pengurangan TPP karena Terlambat Masuk Bekerja sebesar 25% dari TPP *Netto* per hari;
 - c. Pengurangan TPP karena Pulang Cepat sebesar 25% dari TPP *Netto* per hari;
 - d. Pengurangan TPP karena Meninggalkan Jam Kerja Kantor Tanpa Keterangan sebesar 50% dari TPP *Netto* per hari;
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Rumus Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang dan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pengurangan TPP, yaitu:
 - a. Pegawai yang Sakit;
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir/merekam kehadiran pada jam masuk dan/atau jam pulang dan/atau meninggalkan kantor pada saat jam kerja;
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar mengikuti:
 1. Diklat LEMHANAS
 2. Diklat Penjurusan;
 3. Diklat Teknis;
 4. Diklat Fungsional; atau
 5. Diklat Dalam Jabatan; dan
 6. Tugas kedinasan di luar kantor lainnya.
- (2) Keterangan status Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disertai dengan surat izin.
- (3) Keterangan status Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan Surat Perintah Tugas.

Bagian Ketiga
Pengelola Data TPP

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD melalui Sekretaris mengelola data TPP pada instansi.
- (2) Pengelola data TPP pada SKPD dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.
- (3) Pengelola data TPP pada SKPD mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat izin atau surat perintah tugas lainnya sebagai bahan perhitungan capaian aspek perilaku kerja;
 - b. menyusun rekapitulasi hasil input mesin rekam kehadiran elektronik sehingga diperoleh data jumlah pencapaian aspek perilaku kerja;
 - c. menghitung data kehadiran seluruh pegawai secara final;
 - d. mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena alasan kedinasan;
 - e. membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai sebagai dasar perhitungan pembayaran TPP;
 - f. menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja bulanan pegawai tingkat SKPD untuk disahkan kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Penetapan dasar TPP berdasarkan pada jenis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Besarnya TPP yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto setelah dipotong pajak dan pengurangan TPP berdasarkan rekapitulasi daftar kehadiran ditambah pemotongan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas umum daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembayaran TPP.
- (4) TPP dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) kali setiap tahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (5) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh), kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan;
- (6) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel;
- (7) Daftar perhitungan uang TPP disahkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pejabat penanggung jawab mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing SKPD.

- b. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dilampiri dengan :
- Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan pejabat penanggung jawab;
 - Daftar rekapitulasi kehadiran kerja;
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 15

Dana Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis TPP selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 13); dan
3. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 23.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. JABATAN STRUKTURAL

No.	Eselon	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Eselon II/a	15,000,000/Bulan
2	Eselon II/b	12,000,000/Bulan
3	Eselon III/a (Ka KANTOR, Direktur RSUD, Camat)	10,000,000/Bulan
4	Eselon III/a	9,000,000/Bulan
5	Eselon III/b	7,500,000/Bulan
6	Eselon IV/a	5,500,000/Bulan
7	Eselon IV/b	4,000,000/Bulan

B. JABATAN FUNGSIONAL

1. TENAGA AUDITOR FUNGSIONAL

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Auditor Utama	8,000,000/Bulan
2	Auditor Madya	7,000,000/Bulan
3	Auditor Muda	5,000,000/Bulan
4	Auditor Pertama	4,000,000/Bulan
5	Auditor Pelaksana	3,500,000/Bulan

2. DOKTER SPESIALIS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	16,202,000/Bulan
2	Golongan IVc	16,009,000/Bulan
3	Golongan IVb	15,839,000/Bulan
4	Golongan Iva	15,674,000/Bulan
5	Golongan IIIId	15,227,000/Bulan
6	Golongan IIIc	15,150,000/Bulan
7	Golongan IIIb	15,082,000/Bulan

3. DOKTER UMUM/GIGI RSUD

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	6,200,000/Bulan
2	Golongan IVc	6,000,000/Bulan
3	Golongan IVb	5,825,000/Bulan
4	Golongan Iva	5,800,000/Bulan
5	Golongan IIIId	5,450,000/Bulan
6	Golongan IIIc	5,425,000/Bulan
7	Golongan IIIb	5,400,000/Bulan

4. DOKTER UMUM/GIGI PUSKESMAS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	6,200,000/Bulan
2	Golongan IVc	6,000,000/Bulan
3	Golongan IVb	5,825,000/Bulan
4	Golongan Iva	5,800,000/Bulan

5	Golongan III d	5,450,000/Bulan
6	Golongan III c	5,425,000/Bulan
7	Golongan III b	5,400,000/Bulan

5. DOKTER HEWAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV d	6,200,000/Bulan
2	Golongan IV c	6,000,000/Bulan
3	Golongan IV b	5,825,000/Bulan
4	Golongan IV a	5,800,000/Bulan
5	Golongan III d	5,450,000/Bulan
6	Golongan III c	5,425,000/Bulan
7	Golongan III b	5,400,000/Bulan

6. BIDAN/PERAWAT RSUD

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV a	4,650,000/Bulan
2	Golongan III d	4,300,000/Bulan
3	Golongan III c	4,275,000/Bulan
4	Golongan III b	4,250,000/Bulan
5	Golongan III a	4,225,000/Bulan
6	Golongan II d	4,075,000/Bulan
7	Golongan II c	4,050,000/Bulan
8	Golongan II b	4,025,000/Bulan
9	Golongan II a	4,000,000/Bulan

7. ANALIS/APOTEKER/AS.APOTEKER/NUTRISIONIST/SANITARIAN/REKAM MEDIS/RADIOGRAFER/ELEKTROMEDIK/FISIOTERAFIS/ADMINISTRASI KESEHATAN/ PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DI RSUD

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV a	4,650,000/Bulan
2	Golongan III d	4,300,000/Bulan
3	Golongan III c	4,275,000/Bulan
4	Golongan III b	4,250,000/Bulan
5	Golongan III a	4,225,000/Bulan
6	Golongan II d	4,075,000/Bulan
7	Golongan II c	4,050,000/Bulan
8	Golongan II b	4,025,000/Bulan
9	Golongan II a	4,000,000/Bulan

8. BIDAN/PERAWAT PUSKESMAS

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV a	4,800,000/Bulan
2	Golongan III d	4,450,000/Bulan
3	Golongan III c	4,425,000/Bulan
4	Golongan III b	4,400,000/Bulan
5	Golongan III a	4,375,000/Bulan
6	Golongan II d	4,225,000/Bulan
7	Golongan II c	4,200,000/Bulan
8	Golongan II b	4,175,000/Bulan
9	Golongan II a	4,150,000/Bulan

9. ANALIS/ APOTEKER/ AS.APOTEKER/ NUTRISIONIST/ SANITARIAN/ REKAM MEDIS/ RADIOGRAFER/ ELEKTROMEDIK/FISIOTERAFIS/ADMINISTRASI KESEHATAN/ PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT / EFIDEMIOLOGY / ENTOMOLGY PUSKESMAS/DINAS KESEHATAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IV a	4,650,000/Bulan
2	Golongan III d	4,300,000/Bulan
3	Golongan III c	4,275,000/Bulan
4	Golongan III b	4,250,000/Bulan
5	Golongan III a	4,225,000/Bulan

6	Golongan IId	4,075,000/Bulan
7	Golongan IIc	4,050,000/Bulan
8	Golongan IIb	4,025,000/Bulan
9	Golongan IIa	4,000,000/Bulan

10. POLISI KEHUTANAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	4,700,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,500,000/Bulan
3	Golongan IVb	4,325,000/Bulan
4	Golongan IVa	4,300,000/Bulan
5	Golongan IIIId	3,950,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,925,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,900,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,875,000/Bulan
9	Golongan IIId	3,725,000/Bulan
10	Golongan IIc	3,700,000/Bulan
11	Golongan IIb	3,675,000/Bulan
12	Golongan IIa	3,650,000/Bulan
13	Golongan Id	3,575,000/Bulan
14	Golongan Ic	3,550,000/Bulan
15	Golongan Ib	3,525,000/Bulan
16	Golongan Ia	3,500,000/Bulan

11. PEMADAM KEBAKARAN

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	4,200,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,000,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,825,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,800,000/Bulan
5	Golongan IIIId	3,450,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,425,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,400,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,375,000/Bulan
9	Golongan IIId	3,225,000/Bulan
10	Golongan IIc	3,200,000/Bulan
11	Golongan IIb	3,175,000/Bulan
12	Golongan IIa	3,150,000/Bulan
13	Golongan Id	3,075,000/Bulan
14	Golongan Ic	3,050,000/Bulan
15	Golongan Ib	3,025,000/Bulan
16	Golongan Ia	3,000,000/Bulan

12. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	
1	Golongan IVd	4,425,000/Bulan
2	Golongan IVc	4,225,000/Bulan
3	Golongan IVb	4,050,000/Bulan
4	Golongan IVa	4,025,000/Bulan
5	Golongan IIIId	3,675,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,650,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,625,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,600,000/Bulan
9	Golongan IIId	3,450,000/Bulan
10	Golongan IIc	3,425,000/Bulan
11	Golongan IIb	3,400,000/Bulan
12	Golongan IIa	3,375,000/Bulan
13	Golongan Id	3,300,000/Bulan
14	Golongan Ic	3,275,000/Bulan
15	Golongan Ib	3,250,000/Bulan
16	Golongan Ia	3,225,000/Bulan

13. PENGAWAS DAN PENGENDALIAN (WASDAL) LLASDP/LLAJ

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	3,900,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,700,000/Bulan

3	Golongan IVb	3,525,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,500,000/Bulan
5	Golongan IIIId	3,150,000/Bulan
6	Golongan IIIc	3,125,000/Bulan
7	Golongan IIIb	3,100,000/Bulan
8	Golongan IIIa	3,075,000/Bulan
9	Golongan IIId	2,925,000/Bulan
10	Golongan IIc	2,900,000/Bulan
11	Golongan IIb	2,875,000/Bulan
12	Golongan IIa	2,850,000/Bulan
13	Golongan Id	2,775,000/Bulan
14	Golongan Ic	2,750,000/Bulan
15	Golongan Ib	2,725,000/Bulan
16	Golongan Ia	2,700,000/Bulan

14. KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
A	KEPALA SEKOLAH	
	SLTA/SLTP	
1	Golongan IVd	3,400,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,200,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,025,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,000,000/Bulan
5	Golongan IIIId	2,650,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,625,000/Bulan
	SD/TK	
1	Golongan IVd	3,350,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,150,000/Bulan
3	Golongan IVb	2,975,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,950,000/Bulan
5	Golongan IIIId	2,600,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,575,000/Bulan
B	PENGAWAS SEKOLAH	
1	Golongan IVd	3,500,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,300,000/Bulan
3	Golongan IVb	3,125,000/Bulan
4	Golongan IVa	3,100,000/Bulan
5	Golongan IIIId	2,750,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,725,000/Bulan

15. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

No.	Golongan	Besaran TPP (Rp)
1	2	3
1	Golongan IVd	3,200,000/Bulan
2	Golongan IVc	3,000,000/Bulan
3	Golongan IVb	2,825,000/Bulan
4	Golongan IVa	2,800,000/Bulan
5	Golongan IIIId	2,450,000/Bulan
6	Golongan IIIc	2,425,000/Bulan
7	Golongan IIIb	2,400,000/Bulan
8	Golongan IIIa	2,375,000/Bulan
9	Golongan IIId	2,225,000/Bulan
10	Golongan IIc	2,200,000/Bulan
11	Golongan IIb	2,175,000/Bulan
12	Golongan IIa	2,150,000/Bulan
13	Golongan Id	2,075,000/Bulan
14	Golongan Ic	2,050,000/Bulan
15	Golongan Ib	2,025,000/Bulan
16	Golongan Ia	2,000,000/Bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

CONTOH RUMUS PENGURANGAN TPP

No	Uraian		Rumus
1	Nilai Dasar Alokasi Tidak Hadir (NDATH)	:	$\frac{\text{Nilai Alokasi TPP} \times \text{Kehadiran Pegawai}}{\text{Hari Kerja}}$
2	Nilai Dasar Alokasi Terlambat Masuk Bekerja (NDATMB)	:	$\frac{\text{Nilai Alokasi TPP} \times \text{Kehadiran Pegawai}}{\text{Jam Kerja per Bulan}}$
3	Nilai Dasar Alokasi Pulang Cepat (NDAPC)	:	$\frac{\text{Nilai Alokasi TPP} \times \text{Kehadiran Pegawai}}{\text{Jam Kerja per Bulan}}$
4	Meninggalkan Jam Kerja Kantor	:	$\frac{\text{Nilai Alokasi TPP} \times \text{Kehadiran Pegawai}}{\text{Jam Kerja per Bulan}}$

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
PEMOTONGAN TPP KARENA MENINGGALKAN JAM KANTOR TANPA IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dikenakan pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan jam kerja kantor tanpa izin pada hari tanggal.....

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam,
Atasan Langsung

.....
NIP.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dana Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk bulan Tahun Anggaran secara kolektif dari Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas/Badan..... sesuai surat permintaan pembayaran langsung (SPP – LS). (*terlampir*)
2. Bahwa data yang diberikan dan dokumen yang di lampirkan adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penajam,

Kepala Dinas.....

Nama Lengkap

NIP.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR